



## **WALIKOTA SURABAYA**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 188.45/ 294 /436.1.2/2010**

### **TENTANG**

#### **PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA SURABAYA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan khususnya pada tingkat pendidikan dasar, perlu melakukan penggabungan pada beberapa Sekolah Dasar Negeri yang saling berdekatan, khususnya yang berada dalam satu komplek atau lokasi agar lebih efektif dan efisien;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, penggabungan Sekolah Negeri ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan Berita Acara Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya Nomor 421.2/6001/436.6.4/2010 Tanggal 4 Mei 2010 yang dibuat oleh Tim Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

- 2
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
  7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
  9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
  10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 111);
  11. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/226/436.1.2/2009 tentang Tim Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Dengan adanya penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, maka hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan siswa, pengangkatan Kepala Sekolah, pendidikan dan tatacara kanondidikan, Izinpuas serta

- KETIGA** : Pelaksanaan penggabungan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dilakukan secara koordinatif antara Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan unit kerja terkait.
- KEEMPAT** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 9 Juni 2010

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH  
KOTA SURABAYA  
TGL. 9-6 No. 47 Tahun 2010



Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;  
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya;  
 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya;  
 4. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;  
 5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya;  
 6. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya;  
 7. Kepala Bagian Bina Program Sekretariat Daerah Kota Surabaya;  
 8. Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
 NOMOR : 188.45/ 294 /436.1.2/2010  
 TANGGAL : 9 Juni 2010

NAMA SEKOLAH DAN ALAMAT	KECAMATAN	JUMLAH SISWA	JUMLAH GURU/ KEPALA SEKOLAH			PENJAGA SEKOLAH			JUMLAH RUANG			DIGABUNG MENJADI		
			PNS	GTT	PNS	PTT	R.KELAS	R.GURU	R.KS	R.LAB	R.PENJAGA	MCK		
SDN PAKIS VIII Bintang Diponggo Kav. 874	SAWAHAN	485	12	5	-	1	6	1	1	1	1	1	5	SDN PAKIS VIII
SDN PAKIS X Bintang Diponggo Kav. 874		381	8	7	-	1	6	1	1	-	1	1	6	Jalan Bintang Diponggo Kav. 874
JUMLAH		866	20	12	-	2	12	2	2	2	1	2	11	
SDN NGAGEL REJO V Bratang Wetan No. 36	WONOKROMO	298	9	11	-	-	10	1	1	1	1	1	3	SDN NGAGEL REJO V
SDN NGAGEL REJO VI Bratang Wetan No. 36		191	6	6	1	-	8	1	1	-	1	1	3	Jalan Bratang Wetan No. 36
JUMLAH		489	15	17	1	-	18	2	2	1	2	1	6	
SDN KUTISARI III Kutisari Selatan No. 22	TENGGILIS MEJOYO	372	13	3	-	1	5	1	1	1	-	-	2	SDN KUTISARI III
SDN KUTISARI IV Kutisari Indah Selatan VI No. 2		118	8	6	1	-	6	1	1	1	1	1	5	Jalan Kutisari Selatan VI No. 2
JUMLAH		490	21	9	1	1	11	2	2	2	1	1	7	

WALIKOTA SURABAYA,



BAMBANG DWI HARTONO